

**RESOLUSI KONFLIK PETANI SEKITAR PERKEBUNAN KARET MELALUI
PENGEMBANGAN MODAL SOSIAL DI DESA KUTO KECAMATAN KERJO
KABUPATEN KARANGANYAR**

Oleh :

D. PADMANINGRUM, SUTARTO dan AGUNG WIBOWO

Staf Pengajar Jurusan Penyuluhan Komunikasi Pertanian Fakultas Pertanian UNS

ABSTRACT

The majority of local population living close to the rubber plantation are farmers. Some of them lived under the poverty line. The management of rubber estate, in fact, ignored local culture. Both situation, the poverty and lack of corporate social responsibility caused intensive conflicts. The objectives of this research described : the factors formulated social capital's value and the role of social capital in conflict resolution in rubber estate. The constituents of the conflict consist of : the management of rubber estate, internal staff, the local people, local leaders also local and outside traders. This conflict involved : encroachment for agriculture, collecting fire woods illegally and stone mining illegally. In this case, the role of social capital values can described by many activities. The management is required to consider the aspirations of local people and to develop social network between the rubber estate with the local community; in particularly with local leaders; to develop the good exchange with local community, especially funds for social functions; recruitment of the local people to work in the plantation; supply fresh water; all of which is application of the Corporate Social Responsibility (CSR) of the rubber estate. In the mean time, the local people are requested to participate in the maintenance and sustainability of the rubber estate.

Keywords : poverty, conflicts, social capital.

PENDAHULUAN

Perkebunan di Indonesia berkembang melalui dua pola, yaitu perkebunan besar yang dikelola oleh perusahaan besar negara maupun swasta serta perkebunan rakyat yang dikelola oleh para petani kecil baik sebagai pemilik maupun bukan petani pemilik seperti penyewa atau pembagi hasil. Sampai saat ini masih dirasakan adanya kesenjangan antara perkebunan besar dengan perkebunan rakyat. Kondisi demikian mendorong terciptanya berbagai konflik yang terjadi di sekitar perkebunan.

Perspektif Teori Moral Ekonomi yang dipelopori oleh James Scot (1976, 1985, 1989), Wolf (1969) dan Migdal (1974), memandang model gerakan perlawanan kaum tani sebagai model perlawanan "Gaya Asia" : suatu gerakan petani miskin yang lemah dengan organisasi yang akronim, bersifat non formal melalui koordinasi asal sama tahu saja, perlawanan kecil-kecilan dan sembunyi-sembunyi yang dilakukan setiap hari dengan penuh kesabaran dan kehati-hatian, mencuri barang kecil-kecilan, berpura-pura bodoh.

Pendekatan moral ekonomi mendapat kritikan yang tajam dari Popkin (1979). Scott hanya berkutat pada persoalan kolektif. Anggapan ini tentu dibantah oleh Popkin (1979)

dengan alasan bahwa yang berperan terhadap perubahan-perubahan di desa bukanlah komunitas warga desa, melainkan pribadi-pribadi warga petani itu sendiri.

Perspektif lain, Jika diperhatikan secara cermat, latar belakang konflik masyarakat sekitar perkebunan umumnya bersumber dari perebutan tanah antara perkebunan dan rakyat petani. Akar persoalan konflik perkebunan di satu sisi didapat dari sejarah lahirnya hak *erfpacht* yang kemudian dikonversi menjadi hak guna Usaha (HGU) pada tanah perkebunan. (Mustain, 2005).

James Coleman (1990) memformulasikan modal sosial (*social capital*) sebagai varian entitas, terdiri dari beberapa struktur sosial yang memfasilitasi tindakan dari para pelakunya, apakah dalam bentuk personal atau kolektif dalam struktur sosial. Baginya, struktur relasi dan jaringan inilah yang menciptakan berbagai ragam kewajiban sosial, menciptakan iklim saling percaya, membawa saluran informasi dan menetapkan norma-norma dan sanksi sosial bagi para anggotanya. Sementara Francis Fukuyama (1995), menekankan pada dimensi yang lebih luas yaitu segala sesuatu yang membuat masyarakat bersekutu untuk mencapai tujuan bersama atas dasar kebersamaan dan di dalamnya diikat oleh nilai-nilai dan norma-norma yang tumbuh dan dipathi. Situasi tersebutlah yang

menjadi kunci bagi keberhasilan pembangunan (Jousairi Hasbullah, 2006).

Apa yang menjadi masalah adalah tidaklah terbatas pada perkebunan sebagai sumber kehidupan, tetapi yang hilang adalah sebuah energi sosial yang tidak tampak yakni energi kolektif atau modal sosial masyarakat untuk mengatasi masalah bersama. Dari identifikasi berbagai permasalahan tersebut kiranya perlu perumusan masalah pada penelitian ini, yakni :

1. Apa saja yang membentuk nilai-nilai modal sosial (*social capital*) yang masih bertahan dalam resolusi konflik petani di sekitar perkebunan karet di Desa Kuto Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar ?
2. Bagaimana peran modal sosial (*social capital*) dalam resolusi konflik petani di sekitar perkebunan karet di Desa Kuto Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar ?

LANDASAN TEORI

Christenson dan Robinson dalam (Soetomo, 2006) mendefinisikan *community development* adalah suatu proses di mana masyarakat yang tinggal pada lokasi tertentu mengembangkan prakarsa untuk melaksanakan suatu tindakan sosial (dengan atau tanpa intervensi) untuk mengubah situasi ekonomi, sosial, kultural dan atau lingkungan mereka. Perspektif lain Dunhan (1958), melihat pengembangan masyarakat dari sudut program yang terorganisir untuk memperbaiki kehidupan masyarakat melalui kemandirian dan kooperatif, namun dengan bantuan teknik dari pemerintah atau badan sosial lain (Ife, 2005).

Francis Fukuyama (1999) meyakini bahwa modal sosial sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Bahkan Adam Smith di abad ke 18 telah melakukan kajian ekonomi dan telah memasukkan modal sosial yang mereka sebut sebagai "*social contract*"-masyarakat sipil- yang akan menentukan kemajuan pembangunan ekonomi (Jousairi Hasbullah, 2006).

Menurut Coleman dalam Lubis (1999) konsep modal sosial diartikan sebagai aspek-aspek dari hubungan antara individu yang memungkinkan mereka menciptakan nilai-nilai baru. Robert Putnam (1993) mendefinisikan modal sosial sebagai suatu nilai *mutual trust* (kepercayaan) antara anggota masyarakat dan masyarakat terhadap pemimpinnya. Modal sosial didefinisikan sebagai institusi sosial yang

melibatkan jaringan (*networks*), norma-norma (*norms*), dan kepercayaan sosial (*social trust*) yang mendorong pada sebuah kolaborasi sosial (koordinasi dan kooperasi) untuk kepentingan bersama. Bahkan lebih jauh, Putnam melonggarkan pemaknaan asosiasi horisontal, tidak hanya yang memberi *desireable outcome* (hasil pendapatan yang diharapkan) melainkan juga *undesirable outcome* (hasil tambahan) (Carroll, 2001).

Eva Cok (1996) mengkonsepsi-kan "*Social Capital is the trust, reciprocity and mutuality that inheres to social relationship*" Modal sosial adalah sebagai suatu rangkaian hubungan antar manusia yang ditopang oleh rasa saling percaya dan kerja sama untuk kebajikan bersama (Carroll, 2001).

Dalam pengertian ini modal sosial menekankan pentingnya transformasi dari hubungan sosial yang sesaat dan rapuh, seperti pertetanggaaan, pertemanan, atau kekeluargaan, menjadi hubungan yang bersifat jangka panjang yang diwarnai oleh perasaan kewajiban terhadap orang lain. Dengan demikian, negara memiliki peran dalam memperkuat modal sosial masyarakat. Negara dapat menciptakan sasana yang kondusif dan terhindar dari konflik.

Menurut Webster (1966), istilah "*conflict*" berarti konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Namun dalam perkembangannya istilah tersebut sekarang juga menyentuh aspek psikologis dibalik konfrontasi fisik yang terjadi. Konflik berarti persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*) atau suatu kepercayaan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat dicapai secara simultan (Pruitt and Rubin, 2004).

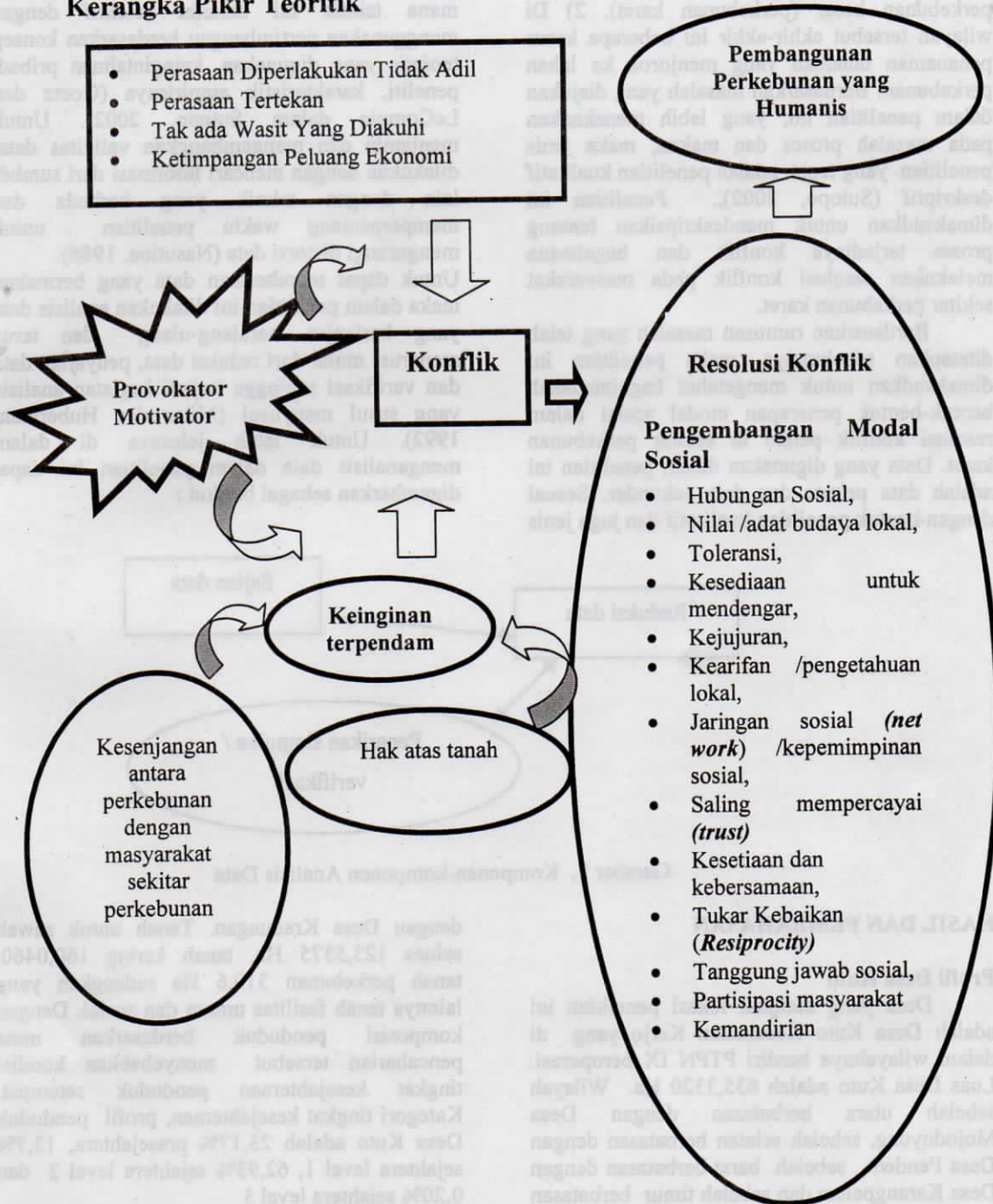
Menurut Koch dalam Suparlan (1999) konflik akan terjadi bila upaya memenuhi kepentingan sendiri dilakukan dengan mengorbankan kepentingan orang lain dan bila dilakukan tanpa aturan yang adil dan diakuhi bersama, tidak ada prosedur untuk menjembatani perbedaan, tidak ada kompromi (*zero sum game*), tidak ada wasit/yuri yang jujur dan diakuhi oleh kedua belah pihak serta adanya kondisi ketidakcukupan dan kondisi endemik (distribusi kekuasaan yang tidak merata).

Untuk memahami cara-cara mengelola konflik, Hugo (1997) dalam bukunya "*Conflict Theories*" menjelaskan sebab-sebab terjadinya konflik. Menurut teori hubungan masyarakat, menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan

pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Selanjutnya menurut teori kebutuhan manusia, berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi.

Sedangkan menurut teori transformasi konflik, berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan (Fisher, *et al.*, 2001)

Kerangka Pikir Teoritik



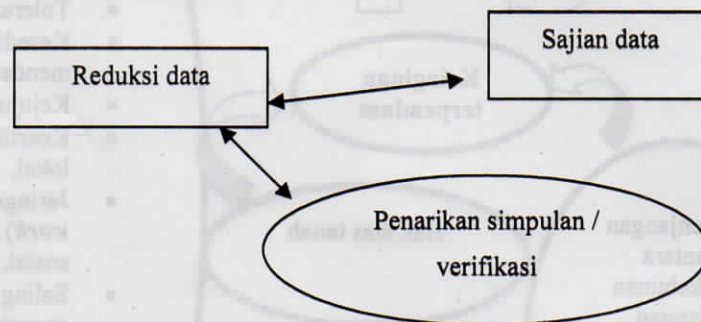
BAHAN DAN METODE

Penelitian ini dilakukan Di Desa Kuto Kecamatan Kerjo Kabupaten Karanganyar yang didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 1) wilayah tersebut merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan perkebunan besar (perkebunan karet). 2) Di wilayah tersebut akhir-akhir ini beberapa kasus penanaman tanaman yang menjorok ke lahan perkebunan. Berdasarkan masalah yang diajukan dalam penelitian ini, yang lebih menekankan pada masalah proses dan makna, maka jenis penelitian yang tepat adalah penelitian kualitatif deskriptif (Sutopo, 2002). Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan tentang proses terjadinya konflik dan bagaimana melakukan resolusi konflik pada masyarakat sekitar perkebunan karet.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimanakah bentuk-bentuk penerapan modal sosial dalam resolusi konflik petani di sekitar perkebunan karet. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif dan juga jenis

sumber data yang dimanfaatkan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : wawancara mendalam, observasi, focus group discussion dan mencatat dokumen.

Teknik cuplikan yang digunakan dalam penelitian ini adalah "*purposive sampling*", di mana teknik ini bersifat selektif dengan menggunakan pertimbangan berdasarkan konsep teoretis yang digunakan, keingintahuan pribadi peneliti, karakteristik empirisnya (Goetz dan LeCompte dalam Sutopo, 2002). Untuk menjamin dan mengembangkan validitas data, dilakukan dengan mencari informasi dari sumber lain dengan teknik yang berbeda dan memperpanjang waktu penelitian untuk mengurangi distorsi data (Nasution, 1988). Untuk dapat memberikan data yang bermakna maka dalam penelitian ini dilakukan analisis data yang berlanjut, berulang-ulang dan terus menerus mulai dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi sehingga terjadi kegiatan analisis yang susul menyusul (Miles dan Huberman, 1992). Untuk lebih jelasnya di dalam menganalisis data dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2. Komponen-komponen Analisis Data

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Desa Kuto

Desa yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Desa Kuto Kecamatan Kerjo yang di dalam wilayahnya berdiri PTPN IX beroperasi. Luas Desa Kuto adalah 635,3320 Ha. Wilayah sebelah utara berbatasan dengan Desa Mojodoyong, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Pendem, sebelah barat berbatasan dengan Desa Karangpelem dan sebelah timur berbatasan

dengan Desa Kradungan. Tanah untuk sawah seluas 123,5375 Ha, tanah kering 160,0460, tanah perkebunan 319,6 Ha sedangkan yang lainnya tanah fasilitas umum dan sosial. Dengan komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian tersebut menyebabkan kondisi tingkat kesejahteraan penduduk setempat. Kategori tingkat kesejahteraan, profil penduduk Desa Kuto adalah 23,17% prasejahtera, 13,7% sejahtera level 1, 62,93% sejahtera level 2 dan 0,20% sejahtera level 3

Tabel 1 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Desa Kuto Kecamatan Kerjo

| Jenjang Pendidikan | Jumlah | Prosentase |
|-------------------------------|-------------|---------------|
| Tamat Perguruan Tinggi (S1) | 47 | 0,83 |
| Tamat Akademi (D1-D3) | 28 | 0,50 |
| Tamat SLTA | 945 | 16,76 |
| Tamat SLTP | 1544 | 27,40 |
| Tamat SD | 1622 | 28,77 |
| Tidak Tamat SD atau sederajat | 21 | 0,37 |
| Sedang Sekolah | 896 | 15,90 |
| Lain-lain | 534 | 9,47 |
| Jumlah | 5637 | 100,00 |

Sumber Data : Monografi Desa Kuto 2006

Tabel 2 Penduduk Menurut Mata Pencapaian di Desa Kuto Kecamatan Kerjo

| Mata Pencapaian | Jumlah | Prosentase |
|-----------------------|-------------|---------------|
| PNS | 104 | 3,82 |
| TNI- POLRI | 13 | 0,48 |
| Pensiunan | 16 | 0,59 |
| Swasta | 1208 | 44,40 |
| Pedagang / Wiraswasta | 110 | 4,04 |
| Petani | 234 | 8,60 |
| Pertukangan | 867 | 31,90 |
| Buruh Tani | 112 | 4,12 |
| Sopir / pengangkutan | 19 | 0,70 |
| Jasa | 26 | 0,96 |
| Lain-lain | 12 | 0,44 |
| Jumlah | 2771 | 100,00 |

Sumber Data : Monografi Desa Kuto 2006

Kedadaan Umum PTPN IX

Letak geografi, secara administratif Kebun Batujamus/ Kerjoarum masuk dalam wilayah : Kabupaten Sragen (Kecamatan Kedawung terdiri 4 Desa, Kecamatan Sambirejo terdiri 7 Desa), Kabupaten Karanganyar (Kecamatan Kerjo terdiri 9 Desa, Kecamatan Mojodedang terdiri 4 Desa, Kecamatan Jenawi terdiri 5 Desa, Kecamatan Ngargoyoso terdiri 5 Desa, Kecamatan Karangpandan terdiri 1 Desa,

Kecamatan Karanganyar terdiri 1 Desa), Kabupaten Sukoharjo (Kecamatan Polokarto terdiri 7 Desa).

Topografi, jenis tanah areal wilayah perkebunana adalah latosol dengan tekstur remah, lempung dengan pH 6-7 dan ketinggian dari muka laut 165-700 m (diatas permukaan laut). Type iklim Schmidt Fergusson Type C (RC Getas). Curah Hujan rata-rata 2500-3000 mm/tahun dengan temperatur udara berkisar antara 20 °C – 27 °C.

Tabel.3. Luas lahan Perkebunan Berdasarkan Topografi

| Topografi | Luas | |
|--------------------|---------|------|
| | Ha | % |
| 0 – 8 (datar) | - | - |
| 8 – 15 (landai) | 736,20 | 18,5 |
| 15 – 25 (berombak) | 1806,58 | 45,4 |
| 25 - 45 (berbukit) | 1433,34 | 36,0 |
| > 45 (bergunung) | - | - |
| | 3976,12 | 100 |

Sumber Data : Profil Kebun Batujamus 2007

Konflik Yang Pernah Terjadi Di Sekitar Perkebunan Karet

Seperti halnya permasalahan yang sering terjadi pada areal hutan/perkebunan di tempat lain, pemanfaatan/pengolahan lahan perkebunan/hutan oleh masyarakat sekitar juga terjadi di Perkebunan Batujamus, dimana ada beberapa penduduk menanam tanaman pangan agak menjorok ke lahan perkebunan. Ada beberapa hal yang mendorong penduduk sekitar perkebunan melakukan penanaman agak menjorok ke lahan perkebunan, yakni tekanan ekonomi dan juga karena mereka merasa lahan perkebunan dahulu kala adalah milik leluhurnya. Namun alasan yang pertama tersebut yang dirasa dominan mendorong masyarakat melakukan itu.

Konflik yang pernah terjadi, sudah diselesaikan melalui pendekatan dengan tokoh masyarakat setempat yang nota bene disegani oleh warganya. Akan tetapi pendekatan ini tidak bisa menjamin lama meredam/mengatasi konflik, dan tidak mustahil ini akan menciptakan kesetiaan semu yang terakumulasi dan pada suatu saat dimana terbuka kesempatan pada akhirnya kesetiaan semu akan berubah menjadi konflik sosial.

Nilai-Nilai Modal Sosial Masyarakat Sekitar Perkebunan Karet

Hakekat dari modal sosial adalah hubungan sosial yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari warga sekitar perkebunan. Hubungan sosial mencerminkan hasil interaksi sosial dalam waktu yang relatif lama sehingga menghasilkan jaringan, pola kerja sama, pertukaran sosial, saling percaya dan norma-norma yang mendasari hubungan sosial tersebut. Masyarakat sekitar perkebunan merasa ada yang tidak seimbang

dalam menjalin hubungan sosial yang ada di masyarakat setempat. Pola hubungan sosial yang terjadi saat ini lebih didasarkan atas situasi-situasi formal. Pihak manajemen perkebunan berhubungan sosial dengan masyarakat sekitar perkebunan hanya didasarkan atas undangan-undangan formal, sehingga dirasa masyarakat setengah hati.

Di bidang sosial budaya, masyarakat Desa Kuto selalu menjaga kekeluargaan dan kegotongroyongan. Hal ini ditunjukkan misalnya pada saat punya kerja, keseripahan (kematian), masyarakat tersebut sangat kelihatan kebersamaannya. Perhatian pihak perkebunan untuk menyatu atau menyelaraskan adat yang berlaku pada masyarakat sekitar perkebunan dinilai oleh warga masih kurang. Bentuk kepedulian bukan berasal dari lembaga namun lebih bersifat individual pihak perkebunan.

Toleransi yang ada di masyarakat sekitar perkebunan, baik antar warga maupun antara warga dengan karyawan perkebunan boleh dikatakan sebagai toleransi yang didasarkan atas tahu sama tahu. Tindakan warga sekitar perkebunan yang *nota bene* tindakan illegal, sebagai contoh, ketika ada masyarakat yang melakukan pencurian/memotong dahan-dahan pohon karet, atau mengambil sisa deresan karet, mereka tidak melaporkan ke pihak perkebunan.

Pemahaman masyarakat sekitar perkebunan terhadap toleransi lebih didasarkan pada kuatnya hubungan sosial antar tetangga warga. Mereka beranggapan nilai toleransi dengan tidak melaporkan dengan pihak perkebunan dirasa tindakan paling baik dan bijak ketimbang mereka melaporkan tetangganya ke pihak perkebunan. Dengan melaporkan tetangganya, mereka beranggapan akan muncul konflik dan ketidakenakan dengan tetangga. Praktis mereka bertindak supaya tetap hidup rukun berbarengan dengan tetangga walau

sebenarnya tindakan warga tersebut tidak benar. Begitu juga yang dilakukan oleh karyawan pihak perkebunan., walaupun sebenarnya mengetahui beberapa warga yang melakukan pemotongan dahan pohon karet tetapi mereka tetap membiarkan. Mereka berpandangan kalau tugas mereka di perkebunan selalu bersinggungan dengan warga sekitar. Mereka berpikir kalau melaporkan ke pihak manajemen, mereka nanti bekerja mesti selalu was-was, perasaan tidak tenang, tidak nyaman dengan warga sekitar.

Lunturnya kejujuran pada masyarakat sekitar perkebunan tidak saja tumbuh dari perilaku individunya namun juga disebabkan oleh beberapa hal seperti lemahnya pemahaman terhadap agama dan pola hubungan-hubungan sosial yang hierarkis feodal dimana masyarakat di lapisan bawah merasakan tekanan-tekanan berat dari pola organisasi yang berkembang. Keberadaan perkebunan dirasa masyarakat tidak mampu mengentaskan dari belenggu kemiskinan, mendorong timbulnya partikel-partikel yang berpotensi membunuh nilai-nilai modal sosial yang ada di masyarakat.

Fenomena *illegal logging* misalnya, dimana disana tidak rakyat jelata yang menjadi aktornya justru pada kalangan orang papan atas yang menjadi aktornya. Kasus-kasus semacam itu menjadi alat legitimasi dan pendorong masyarakat sekitar perkebunan untuk berperilaku yang serupa. Berikut sepeggal kutipan wawancara dengan masyarakat sekitar perkebunan : *"Iha pejabat wae podho ngrampasi kayu, mosok aku sing wong cilik trimo pang kayu ciliki-cilikan wae ora oleh, podho manungsono"*. Artinya yang pejabat saja menghabiskan kayu hutan, masak orang kecil hanya sekedar ranting kayu saja tidak boleh, sama-sama manusianya.

Bagi masyarakat petani sekitar perkebunan, memiliki kearifan-kearifan tersendiri dalam berusaha tani. Pada saat tanaman masih kecil, mereka berusaha menanam tanaman semusim di sela-sela tanaman karet yang masih kecil atau dengan istilah tumpang sari. Langkah tersebut dilakukan walaupun tetap harus membeli atau menyewa lahan. Kegiatan itu dilakukan sampai tanaman karet berusia kurang lebih 3- 4 tahun. Pada saat pohon karet berusia menginjak 4 tahun, petani tidak bisa lagi bisa menanam tanaman semusim karena sudah ternaungi oleh pohon karet. Kondisi tersebut tidak membuat petani putus asa, tapi berusaha memanfaatkan dengan pola atau kegiatan untuk menggembala ternaknya.

Trust atau rasa percaya (mempercayai) adalah suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam satu pola tindakan yang saling mendukung, paling tidak yang lain tidak akan merugikan diri dan kelompoknya (Robert Putnam, 1993 ; World Bank, 2002). Rasa saling percaya yang berlaku di masyarakat sekitar perkebunan adalah tindakan kolektif yang dilakukan oleh warga dalam memanfaatkan lahan perkebunan.

Nilai kebersamaan, merupakan nilai yang sudah disepakati dan mendasari akan terciptanya kekompakan sosial. Modal yang berwujud nilai-nilai kebersamaan yang begitu kuat di Desa Kuto merupakan modal dasar untuk mengintegrasikan kepentingan dan untuk mengembangkan kelompok. Tanpa fasilitasi dari pihak luar, nampaknya masyarakat setempat hanya memiliki kekompakan saja dan tidak berkembang.

Bangsa yang memiliki semangat kemanusiaan yang tinggi akan dengan cepat mendorong kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat. Upaya pembangunan yang dilakukan akan menghasilkan capaian maksimal di semua sektor, karena dengan semangat itu, masyarakat akan memiliki energi sosial yang kuat, yang selanjutnya mendorong semangat untuk saling membantu, saling mempercayai dan saling bertanggungjawab untuk mencapai mutu kehidupan yang lebih baik (Jousairi Hasbullah, 2006). Pernyataan ini barangkali bisa diartikan bahwa perusahaan yang memiliki semangat kemanusiaan yang tinggi akan dengan cepat mendorong perusahaan tersebut berkembang pesat. Karena dengan semangat tersebut masyarakat sekitar perkebunan akan selalu bersama-sama dan sinergis memajukan perkebunan yang ada. Masyarakat akan merasa memiliki (*sense of belonging*) dengan keberadaan perkebunan tersebut. Semangat kemanusiaan yang dilakukan oleh pihak perkebunan selama ini dinilai oleh warga sekitar perkebunan sangat rendah.

Penerapan prinsip etik dalam dunia bisnis berkaitan erat dengan konsep *Corporate Social Responsibility* (CSR), yakni tanggung jawab moral suatu organisasi bisnis terhadap kelompok yang menjadi *stakeholdersnya* yang terkena pengaruh baik secara langsung atau tidak. Kebaikan terhadap masyarakat sekitar perkebunan hanya dilakukan secara individu oleh karyawan perusahaan bukan merupakan platform yang digariskan ataupun kebijakan-kebijakan

yang dibuat oleh perusahaan perkebunan dan jumlahnya sangat terbatas individu yang melakukan hal tersebut berikut nominalnya. Rendahnya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat sekitar berdampak pada sikap dan perilaku masyarakat sekitar perkebunan. Sikap acuh tak acuh dan perilaku yang sebaiknya tidak terjadi sangat mungkin terjadi ketika masyarakat sekitar perkebunan berada di ambang titik resistensinya (miminjam istilah Scott (1987)).

KESIMPULAN

Konflik antara perkebunan dengan masyarakat sekitar perkebunan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan wujud dari akumulasi ketidakselarasan hubungan timbal balik antara kedua belah pihak. Konflik yang terjadi pada masyarakat sekitar perkebunan di Desa Kuto Kecamatan Kerjo masih bersifat individual belum mengarah ke konflik sosial. Resolusi konflik melalui pengembangan modal sosial dirasa cara yang bijak untuk diterapkan oleh perusahaan perkebunan. Nilai-nilai modal sosial yang perlu ditumbuhkembangkan kembali pada masyarakat sekitar perkebunan adalah hubungan sosial, nilai/adat budaya lokal, toleransi, kesediaan untuk mendengar, kejujuran, kearifan /pengetahuan lokal, jaringan sosial (*net work*)/kepemimpinan sosial, saling mempercayai (*trust*), kesetiaan dan kebersamaan, tukar kebaikan (*resiprocity*), tanggung jawab sosial, partisipasi masyarakat dan kemandirian.

Mengatasi konflik di sekitar perkebunan tidak hanya sekedar *insidental* semata dengan pendekatan keamanan namun yang terbaik dilakukan oleh pihak perusahaan adalah dengan pengembangan modal sosial, dengan jalan mengalokasikan anggaran secara rutin untuk kegiatan tersebut. Untuk mempercepat proses pengembangan modal sosial, maka para pegawai perkebunan harus dibekali dengan pengetahuan dan ketrampilan yang terkait dengan pengembangan masyarakat. Pihak perkebunan semestinya bekerja sama dengan *stakeholders* dalam penerapan *Corporate Social Responsibility* secara tepat dan *sustainable*. Misalnya pengembangan agrowisata.

DAFTAR PUSTAKA

- Carroll, 2001. *Social Capital, Local capacity Building and Poverty Reduction*. Manila : The Asian Development Bank.
- Ife, Jime. 1995. *Community Development : Creating Community Alternatives-Vision, Analisis and practice*. Melbourne : Longman.
- Jousairi Hasbullah, 2006. *Social Capital : Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Jakarta : MR-United Press.
- Lubis, 1999. *Pengembangan Investasi Modal Sosial dalam Pembangunan*. Antropologi Indonesia. Th XXIII No. 59 Mei-Agustus 1999.
- Miles, Matthew. B dan Huberman, A. Michael,. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (Terj. Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta : Universitas Indonesia.
- Mustain, 2005. *Gerakan Petani Di Pedesaan Jawa Timur : Studi Kasus Gerakan Reclaiming Oleh Petani Atas Tanah Yang dikuasai PTPN XII Kalibakar Malang Selatan*. Disertasi. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Nasution, 1988. *Metode Penelitian Naturalistik*. Bandung : Tarsito.
- Popkin, Samuel L., 1979. *The Rational Peasant. The Political Economy of Rural Society in Vietnam*, Berkley: University of California Press.
- Scott, James C. 1984. *Moral Ekonomi Petani, Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3ES.
- Suparjan dan Hempri Suyatno, 2003. *Pengembangan Masyarakat. : Dari Pembangunan sampai Pemberdayaan*. Yogyakarta : Aditya Media.
- Sutopo, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif : Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian*. Surakarta : Sebelas Maret University.